

**Analisis Determinan Atas Belanja Modal Desa  
(Studi Empiris pada Desa-Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019)**

Dwi Yuliana Wulandari<sup>1</sup>, Andy Dwi Bayu Bawono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email:dwiywulandr@gmail.com

**Abstract.** *This research aims to determine the determinants of village capital expenditure (Empirical Study on Villages in Sukoharjo Regency in 2019). This research uses quantitative research methods. The population used in this study were all villages in Sukoharjo Regency and obtained 132 villages as samples using the purposive sampling method. The data used is secondary data obtained from the Village Revenue and Expenditure Budget Realization Report in Sukoharjo Regency in 2019 and the official website of the Central Statistics Agency of Sukoharjo Regency. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that the Village Fund had a significant effect on Village Capital Expenditures while the Village Original Income, Village Fund Allocation, the Share of Taxes and Retribution, the Area, and the Number of Village Officials did not significantly influence the Village Capital Expenditure.*

**Keywords:** *Village Income; Village Financial Management; Capital Expenditure.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan atas belanja modal desa (Studi Empiris pada Desa- Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Sukoharjo dan diperoleh 132 desa sebagai sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2019 dan situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa sedangkan Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi, Luas Wilayah, Dan Jumlah Perangkat Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa.

**Kata Kunci:** Pendapatan Desa; Pengelolaan Keuangan Desa; Belanja Modal.

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, di Indonesia pemerintah Desa juga turut aktif memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan visi dan misi perencanaan pembangunan nasional 2015-2019 yang bersumber pada Nawa Cita ke-3 Presiden RI Joko Widodo yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah-daerah dalam kerangka NKRI. Adanya pembangunan di tiap daerah diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga masalah kemiskinan tidak semakin meningkat. Tercatat persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 9,78%, meningkat 0,56% dari tahun 2019 (<https://bps.go.id/>), dalam menanggulangi masalah tersebut pemerintah melakukan berbagai kebijakan seperti adanya

program Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Belanja Modal. Oleh sebab itu, semua yang menjadi hak dan kewajiban desa akan berhubungan dengan keuangan desa dimana perlu dilakukan perincian dalam bentuk rencana keuangan.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, rencana keuangan tahunan pemerintahan desa disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). APBDes memiliki 3 (tiga) komponen yaitu pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Jenis alokasi belanja modal yang terdapat dalam belanja desa memiliki komposisi terbesar daripada jenis belanja lainnya pada setiap program kegiatan yang tertuang dalam APBDes (Abidin, 2015). Dengan adanya belanja modal diharapkan memberikan dampak peningkatan

kualitas fasilitas/layanan publik terhadap pembangunan misalnya untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, gedung, dan lainnya. Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan adanya dukungan dana yang memadai.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjabarkan bahwa pendapatan asli desa merupakan sumber pendanaan yang diperoleh Desa yang dipergunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Desa juga memperoleh sumber pendapatan dari transfer dana desa, alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa dipergunakan dalam meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana hasil dan dana alokasi umum dalam APBD paling sedikit 10% dengan tujuan untuk menunjang dan membiayai pelaksanaan kegiatan di pemerintah desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta untuk meningkatkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Desa juga menerima bagian dari hasil pajak dan retribusi yang besarnya minimal 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa luas wilayah juga merupakan komponen yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana dalam suatu daerah. Luas wilayah dapat dijadikan ukuran suatu daerah dalam pengalokasian untuk pembangunan terutama berupa pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jaringan (Setiyani, 2015). Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, unsur penyelenggaraan pemerintahan desa adalah perangkat desa yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menurut Asrori (2014), salah satu hal penting untuk menunjang kemampuan perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah dengan adanya sarana dan prasarana kantor desa yang memadai.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan belanja modal pada tingkat pemerintah daerah

misalnya penelitian yang dilakukan oleh Intani (2018), Pangestu (2018) dan Setiyani (2015). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Purbasari *et al.* (2018), perbedaannya terletak pada penambahan variabel luas wilayah dan jumlah perangkat desa, objek penelitian, sumber data tidak menggunakan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melainkan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LR APBDes) serta penelitian ini mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang memiliki perbedaan struktur APBDes dari Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada studi sebelumnya. Sehubungan dengan pemberlakuan UU tentang Desa, saat ini masih minim akan penelitian tentang pendapatan desa pada belanja modal desa sehingga perlu diketahui apakah alokasi belanja modal desa mempunyai dampak kenaikan pendapatan atau hanya mengikuti peraturan-peraturan yang ada.

## METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 150 desa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 132 desa. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Sukoharjo tahun 2019 dan situs resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo (<https://sukoharjokab.bps.go.id>).

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$BMD = a + b_1PADes + b_2DD + b_3ADD + b_4BHPR + b_5LW + b_6JPD + e$$

Keterangan: BMD = Belanja Modal Desa, PADes = Pendapatan Asli Desa, DD = Dana Desa, ADD = Alokasi Dana Desa, BHPR = Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi, LW = Luas Wilayah, JPD = Jumlah Perangkat Desa, a = Konstanta, b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub>, b<sub>5</sub>, b<sub>6</sub> = Koefisien regresi, e = error

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear**

Variabel	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	Koefisien (B)	Std. Error		
(Constant)	-1506233354,411	1443776740,646	-1,043	0,299
PADes	0,272	0,241	1,129	0,261
DD	1,368	0,443	3,091	0,002
ADD	1,936	2,567	0,754	0,452
BHPR	0,357	0,443	0,807	0,421
Luas Wilayah	-249724,225	324831,635	-0,769	0,443
Jumlah Perangkat Desa	10778759,972	38018854,285	0,284	0,777
R square	0,234	F-hitung	6,374	
Adjust R square	0,198	Sig	0,000	

Sumber: data diolah, 2021

Dari hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh hasil bahwa Adj R2 sebesar 0,198 atau 19,8% yang berarti variabel PADes, DD, ADD, BHPR, Luas Wilayah dan Jumlah Perangkat Desa dapat menjelaskan Belanja Modal Desa sebesar 19,8% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain, misalnya jumlah irigasi, jumlah panjang jalan desa dan sebagainya. Selain itu, dapat diketahui bahwa variabel PADes, ADD, BHPR, Luas Wilayah dan Jumlah Perangkat Desa memiliki nilai signifikan > 0,05 maka H1, H3, H4, H5, H6 ditolak sedangkan variabel Dana Desa memiliki nilai signifikan < 0,05 maka H2 diterima yang berarti Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa.

**PEMBAHASAN**

**1. Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Modal Desa**

Variabel PADes tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa, diketahui dari nilai signifikansi 0,261 > 0,05 maka H1 ditolak. Hal ini dapat dikarenakan kecilnya kontribusi penerimaan pemerintah desa terhadap total pendapatan yang didapat pemerintah desa. PADes yang rendah disebabkan kurangnya penggalian sumber penerimaan desa, hal tersebut dapat diatasi misalnya dengan meningkatkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, diarahkan dengan cara mempertahankan dan menggali potensi desa agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Faktor lain adalah dikarenakan pemerintah desa memiliki rencana pembangunan masing-masing tergantung pada kebijakan yang ditentukan dan memiliki prioritas penggunaan anggaran setiap tahunnya. Penelitian dalam lingkup Desa masih jarang dilakukan, sehingga jika dilihat di tingkat Kabupaten/Kota, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Waskito (2019) yang

menyebutkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

**2. Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Modal Desa**

Variabel DD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa, diketahui dari nilai signifikansi 0,002 < 0,05 maka H2 diterima. Hal ini sesuai dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2018 bahwa prioritas penggunaan DD pada tahun 2019 masih mengarah pada pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tercantum juga dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Dana Desa diperuntukkan guna meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestu (2018) yang menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, sehingga Dana Desa mempengaruhi Belanja Desa Bidang Infrastruktur. Maka dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya nilai Dana Desa akan memengaruhi Belanja Modal, misalnya dalam biaya pengeluaran untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, dan jaringan.

**3. Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Belanja Modal Desa**

Variabel ADD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa, diketahui dari nilai signifikansi 0,452 > 0,05 maka H3 ditolak. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Alokasi Dana Desa

(ADD) merupakan salah satu dana yang bersumber dari kabupaten untuk desa. Pertimbangan pengalokasian ADD kepada setiap desa terletak pada besar kecilnya kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Berdasarkan hasil yang diperoleh mengindikasikan bahwa Alokasi Dana Desa yang diterima dari daerah sebagian besar digunakan untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, dan disamping itu ADD juga digunakan fokus pada operasional/rutin desa diluar belanja modal, sehingga alokasi untuk belanja modal desa belum banyak teralokasikan di Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Purbasari (2018) yang menyatakan bahwa ADD memiliki tujuan dan dipergunakan untuk menambah dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik dan non fisik, dimana peningkatan tersebut cenderung digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur.

#### 4. Pengaruh Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Modal Desa

Variabel BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa, diketahui dari nilai signifikansi  $0,421 > 0,05$  maka H4 ditolak. Nilai BHPR untuk tiap desa di Kabupaten Sukoharjo memiliki kontribusi yang kecil dan cenderung sama dibandingkan dengan sumber pendanaan yang lain pada tahun 2019 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa varian BHPR tidak sejalan dengan varian belanja Modal yang menandakan BHPR tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik kepada Belanja Modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbasari (2018) yang menyatakan bahwa alokasi BHPR tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal desa.

#### 5. Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Desa

Variabel Luas Wilayah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa, diketahui dari nilai signifikansi  $0,443 > 0,05$  maka H5 ditolak. Hal ini dikarenakan luas wilayah pada desa-desa di Kabupaten Sukoharjo belum menjadi pertimbangan dalam pengalokasian Belanja Modal Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dihastuti (2014) bahwa Luas Wilayah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan Rohmah dan Ikhsan (2019) yang menyatakan bahwa daerah dengan wilayah yang lebih luas akan cenderung membutuhkan belanja modal yang lebih tinggi, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarananya pun lebih banyak agar tersedia pelayanan/fasilitas publik yang baik.

#### 6. Pengaruh Jumlah Perangkat Desa terhadap Belanja Modal Desa

Variabel Jumlah Perangkat Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal Desa, diketahui dari nilai signifikansi  $0,777 > 0,05$  maka H6 ditolak. Hal ini disebabkan jumlah perangkat desa cenderung sama dan sarana prasarana yang dibutuhkan perangkat desa pada tahun 2019 masih memadai dan layak dipergunakan sehingga pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk penambahan sarana dan prasarana bagi perangkat desa.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya Dana Desa yang memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal Desa sedangkan Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, Luas Wilayah dan Jumlah Perangkat Desa tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal Desa. Adapun beberapa saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang pengaruh pendapatan desa terhadap belanja modal desa yaitu diharapkan dapat menggunakan lebih dari 1 tahun LR- APBDes sehingga dapat diketahui kecenderungan hasil penelitian dalam kurun waktu yang lebih lama dan sebaiknya menambah variabel lainnya yang mungkin dapat berpengaruh terhadap Belanja Modal Desa. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk mendukung kegiatan akademik dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah desa guna terwujudnya *good governance*.

### REFERENSI

- Abidin, Muhammad Zainul. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 06 No. 01.
- Asrori. 2014. Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*. Vol. 6 No. 2.
- Dihastuti. 2014. Pengaruh Dana Alokasi

- Umum, Pendapatan Asli Daerah , Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pemerintah Kabupaten Se Provinsi Riau). *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Intani, Rachmi. 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*.
- Pangestu, Ilham Adhi. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADES), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Desa Bidang Infrastruktur (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- Purbasari, Heppy, dkk. 2018. Analisis Pendapatan Asli Desa (PADES), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Terhadap Belanja Modal Desa Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017. *The 8th University Research Colloquium 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto*.
- Rohmah, Nurur dan Ikhsan Budi Riharjo. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2017). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. ISSN 2460-0585.
- Setiyani, Rita Devi. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten di Karesidenan Pati Periode 2009- 2013). *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Waskito, Zuhrotun dan Ruserhliyani. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 3 No. 2.
- <https://bps.go.id/> (diakses pada tanggal 03 Oktober 2020).
- <https://sukoharjokab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 01 November 2020).